

## **Analisis Dampak Bumdes terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

**M. Darwis<sup>1</sup>, Ambok Pangiuk<sup>2</sup>, Agusriandi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: muhammaddarwis283@gmail.com

### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan Lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan Sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan ekonomi Desa dengan menciptakan dan meningkatkan peluang usaha, lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan desa sampai pada titik Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu. Pada penelitian ini metode yang digunakan kualitatif dengan pengecekan keabsahan data dengan teknik *triangulasi* dan metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu dua aparat desa, lima orang pengelola Bumdes dan tiga orang masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator yang dijalankan yakni Infrastruktur, pembangunan gedung serba guna dan dermaga/pelabuhan, Kondisi kesehatan masyarakat, pembangunan PAM air agar masyarakat dapat mendapat air yang layak untuk digunakan sehari-hari. Pembangunan pertanian, pembangunan dermaga/pelabuhan sebagai alat bongkar muat hasil perkebunan dan pertanian. Dan enam yang belum terpenuhi adalah : Pendidikan yang ada dipedesaan, tingkat industrialisasi, perkembangan usaha tingkat rawan bencana, aspek kelembagaan dan modal social, aspek sosial budaya. Dan beberapa kendala yang dapat diidentifikasi: Keterbatasan sumber daya, keterbatasan akses pasar, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Ketergantungan pada Faktor Eksternal, Keterbatasan Infrastruktur, Keterbatasan Modal.

**Kata kunci:** BUMDes, Kesejahteraan, Peningkatan Masyarakat Desa

### **Pendahuluan**

Pembangunan basis perekonomian di pedesaan telah lama dilakukan Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan seperti yang diharapkan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin perekonomian di pedesaan.

Sistem dan mekanisme kelembagaan perekonomian di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, pendekatan baru yang diharapkan mampu merangsang dan menggerakkan roda perekonomian pedesaan adalah melalui pembentukan kelembagaan perekonomian yang dikelola sepenuhnya oleh

masyarakat desa. Lembaga perekonomian ini tidak lagi didirikan berdasarkan instruksi Pemerintah. Namun hal tersebut harus didasari oleh keinginan masyarakat desa yang bersumber dari potensi yang jika dikelola dengan baik akan menciptakan permintaan di pasar.<sup>1</sup>

Sehingga keberadaan lembaga perekonomian ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang mempunyai modal besar di pedesaan. Jadi lembaga tersebut dimiliki oleh desa dan dikendalikan bersama yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Pembentukan lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran perantara yang seringkali menyebabkan peningkatan biaya transaksi antara harga produk dari produsen ke konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang wajar dan konsumen tidak perlu menanggung harga beli yang mahal. Membantu kebutuhan finansial konsumtif dan produktif masyarakat. Menjadi distributor utama pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Selain itu juga berfungsi untuk membina aktivitas para pelaku ekonomi di perdesaan.<sup>2</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan aset dan sumber daya perekonomian desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan perekonomian desa dengan menciptakan dan meningkatkan peluang usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa hingga kesejahteraan masyarakat. Apabila pengelolaan BUMDes berjalan optimal maka Desa akan menjadi Desa yang sejahtera secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat serta menjadi salah satu mitra Pemerintah Desa dalam mewujudkan rencana pembangunan dan perekonomian dengan tuntutan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. dalam mengembangkan bisnis.<sup>3</sup>

Kontribusi BUMdes bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensial dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Dalam UU Desa Pasal 87 ayat (1) memberikan kewenangan kepada desa yang menyatakan: Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut Bumdes. Bumdes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya penguatan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Adi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*.(Jakarta: Rajawali Pers.2015) Hal.29

<sup>2</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul*, Vol.28 .No. 2.2016.

<sup>3</sup> Amalia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Pades) Serta Membutuhkan Perekonomian Desa*, jurnal Of And Development, Volume 5 No. 1, 2014

tentang Desa pada tahun 2014.<sup>4</sup> Bumdes merupakan salah satu sarana pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.<sup>5</sup>

Desa Pematang Rahim Kecamatan Medahara Ulu merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa adalah dengan mendorong pemerintah desa dan masyarakatnya untuk mendirikan dan menjalankan usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekaligus dapat menjadi sumber pendapatan asli bagi desa.

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota BUMDes karya Bersama dan masyarakat desa pematang rahim yaitu sebagai berikut, Berdasarkan wawancara Direktur BUMDes karya Bersama T.Nurasyia,S.Sos mengatakan Implementasi BUMDes di masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan BUMDes masih belum berjalan maksimal. Menurut hasil wawancara dengan pengelola BUMDes Pematang Rahim mengataan bahwa Pengelola BUMDes karya bersama Desa Pematang Rahim sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti adanya sosialisasi tentang BUMDes, penyuluhan pemakaian unit usaha air bersih, penggunaan Pelabuhan bongkar muat dan Gedung serba guna yang bisa digunakan untuk hajatan. Dengan adanya itu tetapi masih ada masyarakat yang belum tergugah untuk bergabung dan memanfaatkan adanya BUMDes. Padahal BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Yang dimana keadaan masyarakat setelah adanya BUMDes masih ada sebagian yang tidak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan pengurus BUMdes.<sup>6</sup> Wawancara oleh pak syamsir selaku sekdes Pematang Rahim terlalu Besarnya pengeluaran dalam pengelola BUMDes dan Desa hanya mendapatkan 30% keuntungan dari BUMDes 70% dikeluarkan untuk gaji karyawan, dan perbaikan fasilitas.<sup>7</sup>

## Landasan Teori

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan manusia dimana masyarakatnya sejahtera, dalam keadaan sehat, dan tenteram, sehingga untuk mencapainya masyarakat memerlukan usaha sesuai dengan kemampuannya. Welfare State adalah Negara Kesejahteraan menurut Bentham yang mengemukakan gagasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan (atau kesejahteraan) sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga negaranya. Bentham menggunakan istilah

<sup>4</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> Sofyani Hafiez. Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 2020. JIA. Volume 5, Nomor 2. h. 326.

<sup>6</sup> T.Nurasyia,S.Sos , “Wawancara Direktur BUMdes”, Pematang Rahim , 1 Februari 2024.

<sup>7</sup> Ahmad Syamsi, “Wawancara Sekdes Pematang Rahim”, Pematang Rahim , 29 Februari 2024.

'utilitas' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, sebaliknya sesuatu yang menimbulkan rasa sakit adalah sesuatu yang buruk.<sup>8</sup>

Sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang dilihat berdasarkan taraf hidup yang lebih baik dalam masyarakat yang mencakup macam-macam aspek kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.

Selanjutnya kesejahteraan sosial tertera di undang-undang No. 11 tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.<sup>9</sup> Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi masyarakat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya yang cukup dan bermutu seperti lingkungan keuangan yang bersih, aman, dan nyaman.

Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki tata kehidupan materil spiritual, jasmani dan rohani maupun tata kehidupan individu dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmur, sentosa dan selamat, yaitu dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan agar kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tenteram lahir maupun batin dan mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani maupun sosial masyarakatnya. Dalam hal ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat desa.

Setiap warga negara atau masyarakat tentunya ingin hidup berkecukupan dan merasa sejahtera dalam hidupnya. Sejahtera dalam kehidupan masyarakat artinya mereka mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan dan juga mempunyai akses dan fasilitas baik dari bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam masyarakat juga harus diperoleh setiap individu yang sejahtera. Namun tidak semua lapisan masyarakat di Indonesia memiliki semua itu, banyak masyarakat yang hidup dengan kondisi yang dinilai kurang sejahtera dan mereka biasa disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan tindakan yang terkoordinasi diambil dengan tujuan untuk mengeksplorasi kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinasi ini adalah sebuah kegiatan kreatif tanpa akhir dari sumber daya manusia (SDM) untuk mendapatkan daya ungkit sumber daya yang lebih baik.<sup>10</sup> Untuk meningkatkan

---

<sup>8</sup> Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", Jurnal: Jurnal Sospol, 2.1 (2016), h.103.

<sup>9</sup> Suharto, Edi "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat" Bandung: PT. Refika Aditama.2010.hal 30

<sup>10</sup> Nilasari, Senja. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Rajawali Press 2014. Hal 20

kesejahteraan di dalam masyarakat diperlukan sebuah intervensi sosial. Salah satunya dengan cara intervensi sosial pada level komunitas. Intervensi komunitas sendiri tentunya tidak dapat luput dari istilah *community work* atau *community practice* dan juga *community organization* dan *community intervention*. *Community Practice* atau praktik pada level komunitas sendiri terbagi menjadi beberapa model yaitu pengembangan masyarakat, aksi komunitas, dan pendekatan pelayanan masyarakat. Sedangkan menurut Rotman dalam Isbandi<sup>11</sup> menjelaskan model intervensi pada komunitas sendiri atau *community intervention* adalah pengembangan komunitas lokal, aksi sosial, serta perencanaan sosial dan kebijakan sosial. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun mengubah derajat kesejahteraan mereka tidak hanya bisa dilakukan dalam intervensi komunitas lokal saja, namun bisa juga dilakukan dengan cara memperkuat organisasi pelayanan kemanusiaan. Strategi dengan meningkatkan layanan masyarakat ini berlandaskan pada upaya untuk mengoptimalkan fungsi manajemen yang didalamnya terdapat fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan, kedua fungsi tersebut berperan sangat aktif dalam meningkatkan kinerja sebuah lembaga<sup>12</sup>.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan dalam upaya penguatan perekonomian desa sebagai bentuk pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Desa itu sendiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program pemerintah berbasis ekonomi yang bertujuan membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk barang dan jasa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga perekonomian yang modal usahanya dibangun atas prakarsa masyarakat, hal ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus berasal dari masyarakat itu sendiri. Latar belakang didirikannya BUMDes sendiri adalah untuk menampung seluruh kegiatan di bidang perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa. Kekayaan desa dan dana desa dipisahkan untuk pengelolaan aset, jasa dan usaha lainnya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Pendirian BUMDes dilakukan sebagai salah satu bentuk pengelolaan perekonomian desa untuk mencapai tujuan BUMDes dengan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dari produktif hingga konsumtif melalui jasa distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang diawasi oleh desa dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya penguatan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menyesuaikan kebutuhan dan potensi desa setempat. Landasan pembentukan BUMDes didasarkan pada pemerintahan desa dan prinsip gotong royong masyarakat desa,

---

<sup>11</sup> Adi, Isbandi Rukminto. 2015. Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan). Jakarta: Rajawali Pers. 2015 Hal 37

<sup>12</sup> Adi, Isbandi Rukminto. "Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)". Jakarta: Rajawali Pers. 2015. hal 221.

kegiatan partisipatif dan emansipatoris dari masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No.9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian dan Pengurusan BUMDes.

BUMDes dapat membentuk unit-unit usaha seperti Perseroan Terbatas dengan tujuan membentuk persekutuan permodalan, yang dibentuk berdasarkan perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro sebesar 60%. Sumber modal BUMDes selain APBDes antara lain modal desa, seperti hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat atau lembaga donor, bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, kerjasama dunia usaha dari pihak swasta, lembaga sosial.

Menurut peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>13</sup>

Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang di cita-citakan selama ini. Salah satu faktor yang mendominasi adalah intervensi dari pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat desa.

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat, perlu dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasikan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga koeksistensinya bersama bangsa dan negara lain.<sup>14</sup>

## Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci yang digunakan untuk

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

<sup>14</sup> Dian Iskandar Jaelani "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)" *jurnal pemberdayaan ekonomi*. Vol. 1 No. 1, h.21.

meneliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini objek yang alamiah yang dimaksud pada temuan fakta alamiah di lapangan terkhusus mengenai bagaimana Analisis Dampak BUMDES Terhadap Kesejahteraan Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu data yang ditemukan dilapangan, dikumpulkan berasal dari naskah wawancara dan observasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan *realita empiric* dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di BUMDes karya bersama desa Pematang Rahim. Ini dipilih sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa BUMDes ini yang ada sudah mengalami perkembangan.

## Hasil dan Pembahasan

Dampak BUMDes terhadap kesejahteraan Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh data yang memberikan informasi Dampak BUMdes terhadap kesejahteraan Desa Pematang Rahim. Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mewawancarai Sekdes Pematang Rahim, yaitu sebagai berikut:

1. Pak Ahmad Syamsi. Pak Ahmad Syamsi adalah sekeretaris desa Pematang Rahim, Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pak syamsi, mengatakan:

*"Hadirnya BUMDes diharapkan sebagai solusi untuk menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui kegiatan usaha produktif serta mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa, terutama bagi generasi muda. BUMDes dipandang sebagai media untuk memberdayakan potensi lokal desa. Kami Aparat desa mengharapkan BUMDes dapat memfasilitasi akses permodalan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro di desa kan tetapi hari ini BUMDes yang ada di tempat kami masih befokus pada peningkat PAMair, gedung serbaguna dan Pelabuhan bongkar muat dan khawatir juga dengan tata kelola BUMDes yang masih lemah, transparansi keuangan yang rendah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan SDM Pengelola BUMdes secara Profesional, Berharap kedepan BUMdes karya bersama yang ada didesa kami mampu melibatkan masyarakat luas dalam pengelolaan demi kejauan BUMDES yang ada didesa pematang rahim".*

<sup>16</sup>

2. Pak Alan. Pak Alan adalah Kasi Kesra Pemerintah Desa pematang rahim, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Alan:

*"BUMDes di katagorikan sebagai salah satu BUMDes yang aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Kecamatan Mendahara Ulu, berharap kedepan kita lebih meningkat item BUMDes agar lebih banyak mmbantu pendapat desa"<sup>17</sup>.*

<sup>15</sup> Sugiyon, *Metode Penelitian Kiantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung, Alfabeta, 2012),9.

<sup>16</sup> Ahmas Syamsi, Wawancara Sekdes Pematang Rahim, 08 April 2024.

<sup>17</sup> Alan, "Kasi Kesra Pemerintah Desa", Pematang Rahim, 17 April 2023

3. Ibu T. Nurasyia S.Sos. Ibu T. Nurasyia S.Sos Adalah Direktur BUMDes Karya Bersama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu T. Nurasyia, mengatakan:  
*"Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa, BUMDes diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan usaha tersebut, BUMDes yang ada di Pematang Rahim beberapa tahun sudah berjalan dengan baik tapi ada beberapa problem yang sering terjadi, banyak masyarakat yang belum memahami tentang adanya BUMDes dan memanfaatkan keberadaan BUMDes".*<sup>18</sup>
4. Aldi Rahman. Aldi Rahman adalah Bendahara BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan bapak Aldi Rahman:  
*"Kehadiran BUMDes yang kami kelola ini terkadang memiliki berapa hambatan yang sering terjadi, apalagi pada usaha air bersih, terkadang masyarakat ada yang melakukan penunggakan pembayaran yang mengakibatkan target tidak sesuai dengan yang kita inginkan"*<sup>19</sup>.
5. Bapak Sahid. Bapak Sahid adalah Pengelola PAM Air, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti Bapak Sahid mengatakan:  
*"PAM Air ini sudah berjalan sejak tahun 2019 sampai sekarang, kendala yang sering kami hadapi, beberapa tunggakan pembayaran dari masyarakat pengguna PAM Air dan beberapa pipa yang sering mengalami kebocoran".*<sup>20</sup>
6. Ibu Mirna. Ibu Mirna ialah pengelola gedung serbaguna yang ada di Desa Pematang Rahim ,dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa Ibu Mirna mengatakan:  
*"Gedung serba guna yang ada didesa kami merupakan gedung pertama usaha BUMDes yang ada desa pematang rahim sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, pendapatannya gedung hanya berasal dari ketika orang main badminton, kalau acara nikahan jarang digunakan karna masyarakat desa lebih memilih buata acara degan menggunakan tenda (outdoor), berharap kedepan bahwa gedung yang ada ini dapat dimanfaatkan masyarakat agar pendapatan gedung serba guna ini dapat meningkat. karena perawatan gedung lumayan mahal"*<sup>21</sup>.
7. Bapak Anto. Bapak Anto adalah selaku Warga Pematang Rahim. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti Bapak anto mengatakan:  
*"Dengan adanya BUMDes hari ini sangat membantu kami dalam mendapatkan air bersih, tidak seperti seblumnya kami menggunakan air ala kadar nya, mengigit daerah kami ini air ya hitam karna lahan gambut".*<sup>22</sup>
8. Bapak Syahril. Bapak Syahril selaku warga Pematang Rahim, berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti Bapak anto mengatakan:  
*"Berharap kedepan para pengelola BUMDes dapat transparasi atau keterbukaan masalah anggaran dan pendapatan BUMDes agara masyarkat dapat informasi terkait perkembangan, dan saran saya selaku warga agara pengelola BUMDes membuat informasi Mading Kantor desa agara siapapun bisa melihat"*<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> T.Nurasyia, "Direktur BUMDes Karya Bersama", Pematang Rahim, 11 April 2023.

<sup>19</sup> Aldi Rahman, "Bendahara BUMDes Karya Bersama", Pematang Rahim, 11 April 2023.

<sup>20</sup> Sahid, "Pengelola PAM Air", Pematang Rahim, 20 April 2023.

<sup>21</sup> Mirna, "pengelola gedung serbaguna", Pematang Rahim, 21 April 2023.

<sup>22</sup> Anto, "Warga Pematang rahim" Pematang Rahim, 22 April 2023.

<sup>23</sup> Syahril "Warga Pematang rahim" Pematang Rahim, 22 April 2023.



9. Ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah selaku warga Pematang Rahim dan pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti Ibu Siti Aminah mengatakan:

*"Berharap kedepannya BUMDes dapat memberikan permodalan bagi pengembangan usaha yang kami miliki agar dapat menambah pendapat masyarakat kecil seperti kami ini"*<sup>24</sup>.

### **Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes Karya Bersama dapat memberikan dampak positif terhadap Desa Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **Kendala BUMDes Terhadap Kesejahteraan Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Setelah meneliti hasil pencarian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait dengan kesejahteraan Desa Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut adalah beberapa kendala yang dapat diidentifikasi:

- a) Keterbatasan Sumber Daya : Salah satu kendala yang dihadapi oleh BUMDes adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal modal, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan BUMDes untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b) Keterbatasan Akses Pasar: BUMDes juga mungkin menghadapi kendala dalam mengakses pasar yang lebih luas. Terbatasnya akses pasar dapat membatasi potensi pendapatan dan pertumbuhan usaha BUMDes, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.
- c) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan: BUMDes mungkin menghadapi kendala dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha dengan efektif. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan usaha dan potensi pertumbuhan BUMDes.
- d) Ketergantungan pada Faktor Eksternal: BUMDes juga dapat menghadapi kendala yang berasal dari faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau fluktuasi harga komoditas. Perubahan ini dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan usaha BUMDes, serta kesejahteraan masyarakat desa.
- e) Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak atau akses listrik yang terbatas, juga dapat menjadi kendala bagi BUMDes. Keterbatasan infrastruktur dapat mempengaruhi efisiensi operasional BUMDes dan pertumbuhan usaha.

<sup>24</sup> Siti Aminah "Warga Pematang rahim" Pematang Rahim, 24 April 2023.

- f) Keterbatasan Modal Usaha dalam pengembangan BUMDes, Modal yang terbatas dapat membatasi kemampuan BUMDes untuk mengembangkan produk, meningkatkan produksi.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan mengenai Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

1. Dari 9 indikator, persyaratan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pembangunan yang ada di pedesaan guna mensejahterakan rakyatnya. baru 3 indikator yang dijalankan saat ini ialah: a) Infrastruktur, pembangunan Gedung serba guna dan Dermaga/pelabuhan, b) Kondisi Kesehatan masyarakat, pembangunan PAM Air agar masyarakat dapat mendapat air yang layak untuk digunakan sehari-hari, dan c) Pembangunan pertanian, pembangunan Dermaga/pelabuhan sebagai alat bongkar muat hasil perkebunan dan pertanian. Dan ada 6 indikator yang belum terpenuhi oleh BUMDes terhadap Desa Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adalah sebagai berikut: 1) Pendidikan yang ada dipedesaan, 2) Tingkat industrialisasi, 3) Perkembangan usaha, 4) Tingkat rawan bencana, 5) Aspek kelembagaan dan modal sosial, dan 6) Aspek sosial budaya.
2. Kendala BUMDes Terhadap Kesejahteraan Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah meneliti hasil pencarian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terkait dengan kesejahteraan Desa Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut adalah beberapa kendala yang dapat diidentifikasi: Keterbatasan Sumber Daya, Keterbatasan Akses Pasar, Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan, Ketergantungan pada Faktor Eksternal, Keterbatasan Infrastruktur, dan Keterbatasan Modal.

## Daftar Pustaka

- Agama RI, Depertemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Adi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.2015.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Deppennas PKDSP, *Buku Panduan Bumdes*, (Jakarta: PP-RPDN),2007.
- Dkk Moh. Mahfud MD., *Porsiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: PSP UGM, 2019.

- Edi Suharto, *Pembangunan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- H.A.W.Widjaya, *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Herry Kamaroesid, *Ata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Lexy J Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeini . *“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul*. Yogyakarta, 2016.
- 32 M. Abdul Mannan, *“Teori Dan Praktek Ekonomi Islam”*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhajir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nilasari, Senja. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Rajawali Press 2014.
- Sugiyon, *Metode Penelitian Kiantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2012.
- Suharto, Edi *“Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”* Bandung: PT. Refika Aditama.2010.
- Ade Eka Kurniawan, *“Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)”*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Tahun 2016
- Agunggunanto, D. E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, *“Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha MilikDesa (BUMDes).”* *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13, no. 1 (2021): 67-81.
- Iskandar Jaelani, Dian. *“Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)”* *jurnal pemberdayaan ekonomi*. Vol. 1 No. 1, h.21.
- Kusuma Dewi, Amalia Sri. *“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Pades) Serta Membutuhkan Perekonomian Desa”*. *Jurnal Of And Development*, Volume 5 No. 1, 2014.
- Oman Sukmana, *“Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”*, *Jurnal: Jurnal Sospol*, 2.1, 2016.

- Ratna Sri Anggraeni, Maria Rosa. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidu". Vol.28 .No. 2.2016.
- Rizki Anugrah, Ce Mulya. "Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan memberdayaan masyarakat Desa di Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*. Vol. 5 No. 3, 2021 hlm 1-10.
- Yusuf Agunggunanto, Edy dkk. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 13, No 1 (2016).
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 Ayat 1-3.
- Undang-undang No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat 3.
- Ahmas Syamsi, Wawancara Sekdes Pematang Rahim, 08 April 2024.
- Alan, "Kasi Kesra Pemerintah Desa", Pematang Rahim, 17 April 2023
- Aldi Rahman, "Bendahara BUMDes Karya Bersama", Pematang Rahim, 11 April 2023.
- Anto, "Warga Pematang rahim" Pematang Rahim, 22 April 2023.
- Hasan, "pengelola Pelabuhan/Dermaga", Pematang Rahim, 22 April 2023.
- Mirna, "pengelola gedung serbaguna", Pematang Rahim, 21 April 2023.
- Sahid, "Pengelola PAM Air", Pematang Rahim, 20 April 2023.
- Siti Aminah "Warga Pematang rahim" Pematang Rahim, 24 April 2023.
- Syahril "Warga Pematang rahim" Pematang Rahim, 22 April 2023.
- T.Nursyiah. "Wawancara Direktur BUMdes, Pematang Rahim, 11 April 2024